

Lampiran Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Tanggal 21 Maret 2018
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Disclaimer:

Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan dalam lampiran bahan mata acara RUPS Tahunan ini, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan

Mata Acara Ketiga



Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tambahan Penjelasan

Penetapan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Kelima

Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan)

Tambahan Penjelasan

- Sesuai dengan Pasal 2 POJK Recovery Plan, Perseroan wajib menyusun Rencana Aksi (Recovery Plan) yang secara garis besar merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi.
- Perseroan telah menyusun Recovery Plan tersebut dengan indikator-indikator yang mengacu pada batasan yang ditetapkan oleh regulasi seperti antara lain tingkat kecukupan modal dan kecukupan likuiditas serta dengan memperhatikan prinsip tata kelola pada Bank.
- Salah satu komponen penting dalam Recovery Plan adalah Opsi Pemulihan (Recovery Options) yang merupakan pilihan tindakan yang akan dipilih oleh Perseroan sebagai bank sistemik untuk memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha.
- Berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) POJK Recovery Plan, Perseroan wajib memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang wajib dipenuhi oleh Perseroan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
- Adapun bentuk dari instrumen utang akan berupa Obligasi Subordinasi atau Medium Term Notes dengan fitur write-down dan jangka waktu minimal 5 tahun serta jumlah maksimal 1 triliun yang syarat dan ketentuan lainnya saat ini masih dalam kajian Perseroan.



Terima kasih